

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki luas laut yang mencakup 75% dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat kaya dan beragam. Dengan keanekaragaman sumberdaya laut dan perikanan yang melimpah diyakini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan tumpuan masa depan apabila berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dapat dipecahkan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan (Dyah, 2005).

Berbagai usaha pembangunan di bidang kelautan dan perikanan terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dengan peningkatan pendapatan serta perbaikan status sosial. Dalam rangka upaya pembangunan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup nelayan, pemerintah telah membangun sejumlah pelabuhan perikanan yang berfungsi selain sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan juga bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan nasional yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya sarana dan prasarana di bidang perikanan (Murwati, 2010).

Selama ini pemerintah didalam mengembangkan perikanan telah menempuh dua macam cara pendekatan. Pertama, dengan mengembangkan terlebih dahulu prasarana pelabuhan perikanan dengan tujuan untuk merangsang perkembangan usaha perikanan di daerah yang bersangkutan untuk kemudian lebih memajukannya. Pendekatan ini berorientasi kepada prospek perkembangan usaha penangkapan dan pengolahan serta pemasaran

di masa mendatang, dengan konsekuensi bahwa pada tahap permulaannya pelabuhan yang telah dibangun tersebut belum menunjukkan fungsinya. Akan tetapi dengan harapan secara bertahap dapat maju sehingga nantinya dapat mencapai kapasitas penggunaan yang optimal. Pendekatan yang kedua membangun pelabuhan perikanan di daerah-daerah yang sebelumnya telah menunjukkan usaha perikanan yang telah berkembang (Murdiyanto, 1982).

Dalam rangka untuk menunjang kegiatan atau usaha di bidang perikanan laut dan untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan bagi nelayan maka mutlak diperlukan dukungan sarana dan prasarana perikanan antara lain dengan mengadakan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan sendiri dibedakan menjadi 3 tipe yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan untuk melengkapi tiga tipe pelabuhan perikanan tersebut juga dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Muhammad, 2003).

Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A) adalah pelabuhan yang diperuntukan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan Internasional mempunyai perlengkapan untuk mengolah, dan sesuai dengan kapasitas handlingnya, jumlah ikan yang didaratkan minimum 2000 ton per hari atau 73.000 ton per tahun baik untuk pemasaran di dalam negeri maupun untuk ekspor (Murdiyanto, 1982).

Suatu pelabuhan perikanan memerlukan berbagai aktivitas kepelabuhan perikanan, agar fungsi pelabuhan terpenuhi. Berbagai aktivitas tersebut haruslah diselenggarakan dengan baik dan dikembangkan. Pengembangan aktivitas yang terjadi di pelabuhan perikanan pada umumnya terkait dengan ketersediaan fasilitas. Sebagai contoh, aktivitas pelelangan di suatu pelabuhan perikanan terjadi apabila di pelabuhan tersebut memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang

merupakan fasilitas fungsional. Begitu juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya seperti pendaratan hasil tangkapan, karena adanya fasilitas dermaga pendaratan dan fasilitas lainnya; sarana pengangkut ikan, basket/keranjang ikan, dan air bersih (Ginting, 2011).

Kota Kendari, sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki luas perairan laut sekitar 177,64 km<sup>2</sup> dengan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 85,8 km, ditambah Pulau Bungkutoko yang berhadapan langsung dengan Laut Banda, sehingga memberi cukup peluang dan harapan yang sangat strategis untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Dimana Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari merupakan pusat industri perikanan terpadu di kawasan Timur Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 64/MEN/2010 Tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim *Asean Development Bank* (ADB) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perikanan tahun 1984 dalam KKP (2013), ditetapkan pantai Teluk Kendari sebagai lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kendari merupakan teluk yang aman dari gangguan angin dan gelombang sehingga tidak memerlukan bangunan pemecah gelombang (*Breakwater*);
2. Letak Kendari yang berhadapan langsung dengan laut Banda yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar;
3. Terdapat beberapa perusahaan perikanan yang sudah berkembang dan melaksanakan ekspor sehingga dibutuhkan prasarana untuk pengembangan;
4. Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan areal pembangunan dan memasukkan kedalam *Master Plan* Pembangunan Daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kondisi fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara;
2. Sejauh mana tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara oleh nelayan; dan
3. Bagaimana strategi peningkatan pemanfaatan fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara.
2. Menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara.
3. Menentukan strategi peningkatan pemanfaatan fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat nelayan mengenai fungsi dan manfaat dari fasilitas-fasilitas pelabuhan.
2. Bagi instansi terkait, diharapkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kebijaksanaan pengelolaan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara dalam mengembangkan fungsi dan peran pelabuhan.

3. Bagi kalangan akademis, diharapkan dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara.

#### 1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari–Sulawesi Tenggara pada bulan Februari – Maret 2014.

